

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Dakar tahun 2000 tentang Education For All (EFA), yang berisi 6 pokok, yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan gender, pendidikan keterampilan hidup dan pengadaan pengelolaan pendanaan pendidikan. Mengisyaratkan semua negara yang menandatangani untuk meratifikasi UU pendidikan di negaranya. Indonesia adalah salah satu negara tersebut, melalui UU sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (Wajar Dikdas).

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1999 tentang empat prinsip yang terkandung dalam KHA yaitu Non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak hidup serta penghargaan terhadap pendapat anak, sebagai landasan hak yang harus diperoleh anak. Mempertegas kebutuhan anak sebagai hak hidup.

Sebagai negara timur serta kepulauan, Indonesia memiliki corak ragam budaya dan adat istiadat yang sampai kini masih dipegang oleh tradisi tertentu. Adat istiadat yang masih lestari itu akan mempengaruhi proses pendidikan bagi masyarakatnya. Adat istiadat leluhur yang kental dengan larangan dan pantangan merupakan tantangan tersendiri bagi proses pendidikan melalui wajar dikdas yang dicanangkan.

Manusia yang memiliki kebudayaan melalui proses belajar dari lingkungannya dan adanya hubungan timbal-balik dengan lingkungan alam. Pandangan Kaplan dan Menners (1999:106) mengatakan bahwa rumusan hubungan timbal-balik antar budaya merupakan sebuah elemen sirkulasi yang tak terelakan antara lingkungan budaya, atau budaya lingkungan. Mereka beralasan bahwa interaksi antara habitat alami dengan sistem budaya melibatkan suatu pengaruh diantara elemen-elemen yang disebut “balikan” atau “kausalitas timbal-balik”, hal inilah yang menjadi landasan bagaimana manusia harus menyesuaikan atau beradaptasi terhadap lingkungan baru di tempat mereka tinggal untuk melahirkan keseimbangan (homeostatis) sebagai aplikasi dari hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungan termasuk didalamnya kebutuhan akan mendapatkan pendidikan yang layak.

Budaya yang membaaur antara tradisi dan kepentingan negara untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan budaya, masih jauh dari harapan. Belum lagi terhadap cara pembelajaran dan pengajaran yang banyak mengandung ilmu pengetahuan populer akan banyak mempengaruhi pola budaya yang ada. Menurut Khoelberg (1981) pendidikan adalah proses akulturasi dimana dipahami sebagai sebuah fenomena yang terjadi takala kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat kontak dan berlangsung terus menerus sejalan pola-pola budaya asal kelompok itu. Akibat proses pendidikan yang berlangsung terus menerus, sehingga membentuk perubahan kepribadian.

Adanya pemeliharaan adat istiadat yang turun temurun tersebut, akhirnya menjadi sebuah budaya etnik baru di tengah masyarakat. Seperti beberapa budaya etnik yang masih dipegang teguh, budaya anak dalam di riau, budaya baduy di banten, budaya dayak di kalimantan, budaya tengger di jawa timur, budaya mentawai di nusa tenggara serta yang lainnya. Dari budaya-budaya inilah akhirnya diduga penganangan pendidikan lewat wajar dikdas akan mendapat kesulitan.

Kampung naga terletak diantara garut dan tasikmalaya. Kampung ini letaknya 30 km dari ibukota kabupaten tasikmalaya. Untuk mencapai kampung naga harus berjalan menuruni bukit dan jalan kecil bertembok dan berbelok dengan trap tangga sebanyak 335. Secara administratif kampung naga termasuk kedalam desa neglasari kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya.

Dilihat dari segi topografi bentuk kampung naga seperti telur dengan bagian barat meninggi sedangkan bagian timur merendah. Penghasilan asli daerah tersebut adalah dari bertani dan berladang, sebagian juga ada yang bergerak dibidang kerajinan anyaman bambu. Kultur yang dibangun masih mengikatkan diri dengan tradisi kesundaan yang kental. Beberapa adat istiadat masih dipegang teguh sesuai dengan aturan yang digariskan oleh 'karuhun'. Selain masih konsisten dengan aturan dan adat istiadat sunda nya. Mereka pun tidak menutup diri dengan pengetahuan dan keilmuan.

Peranan aturan adat yang melekat pada budaya etnik ini akhirnya harus diakomodir oleh negara sebagai bagian integrasi dari pendidikan itu sendiri. Menurut Sunaryo Kartadinata dalam kolom PR (12 Januari 2006) mengatakan bahwa saat ini keberperanan budaya lokal kurang diakomodir oleh komponen pendidikan, baik dalam kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Melalui hal itulah bagaimana seharusnya lingkungan sekolah yang ada di daerah budaya etnik kampung naga, bisa mengakomodir peranan budaya lokal yang masih dipegang teguh dengan pencahangan pendidikan. Sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah tentang wajar dikdas 9 tahun.

Dugaan-dugaan kesulitan yang dialami oleh sekolah yang berada di daerah budaya etnik harus dapat berperan sebagai pendidikan inklusif bagi pelayanan anak-anak di daerah budaya etnik. Dalam pendapatnya tentang budaya lokal Dadang Dally mengatakan bahwa pencahangan wajar dikdas ke depan harus dapat mengakomodir budaya lokal disekitar, untuk membentuk pola pendidikan yang akan dilaksanakan dalam komponen pembelajaran (kolom PR,12 Januari 2006).

Sebagai gambaran keadaan pendidikan di kampung naga dapat dibaca pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Data Pendidikan Desa Neglasari dan Dusun Kampung Naga

Jumlah Penduduk Desa Neglasari	Jumlah Penduduk Dusun Kampung Naga	Data Pendidikan Desa Neglasari				Data Pendidikan Dusun Kampung Naga			
		SD	SMP	SMU	PT	SD	SMP	SMU	PT
7.453 Jiwa	439 Jiwa	256	186	198	15	36	17	5	0

Sumber : Data Statistik Desa Neglasari Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya

Pendidikan inklusif sebagai bagian filosofi EFA memandang bahwa semua anak harus terlayani pendidikannya. Anupam (2005) dalam kolom EENET mengatakan bahwa peran sekolah dalam memberikan layanan pendidikan tidak lagi boleh memandang dari mana asal siswa didiknya tetapi harus mulai melihat bahwa semua siswa didik harus dilayani sama. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa perbedaan pada siswa didik adalah sesuatu yang normal dan tidak dapat dilepaskan dari kodratnya sebagai manusia di dunia (Anupam,2005).

Secara spesifik, bagi sekolah yang berada di latar belakang budaya etnik menjadi sebuah masalah besar ketika peranan adat dalam penentuan perencanaan pendidikan akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan pendidikan. Perlunya strategi dalam pelayanan pendidikan harus dirancang oleh penyelenggara pendidikan di sekolah yang berada di budaya etnik dalam memberikan pelayanan terbaik bagi semua siswanya.

Kenyataan di lapangan siswa dari budaya etnik kampung naga merupakan bagian terkecil dari keseluruhan siswa di sekolah dasar. Keunikan dan keragaman yang masih dipegang oleh anak inilah yang menjadi sasaran untuk penentuan strategi pelayanan pendidikan di sekolah dengan latar belakang budaya etnik kampung naga.

Dengan adanya sifat budaya menetap pada siswa didik dari budaya etnik kampung naga, merupakan persoalan tersendiri yang membutuhkan pemikiran dalam kerangka minoritas etnik yang ada. Persoalan lainnya adalah bagaimana sikap kebanyakan orang kampung naga tentang peran sekolah ini. Apakah sekolah berlatar budaya etnik kampung naga diakui telah banyak membantu keikutsertaan anak kampung naga? Ataupun ada partisipasi lain dari masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan anak kampung naga? Dari itu semua ada dugaan bahwa sekolah akan mengalami kesulitan dalam melayani anak yang berlatar belakang budaya etnik kampung naga dan memerlukan strategi layanan khusus. Hal tersebut akan menjadi pokok masalah yang memerlukan penelitian sehingga dapat dijawab untuk implementasi pendidikan inklusif menuju pendidikan untuk semua di daerah budaya etnik lainnya di Indonesia.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Latar belakang permasalahan menunjukkan bahwa untuk menemukan strategi pendidikan dalam sekolah latar budaya etnik kampung naga perlu pendalaman kajian terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam budaya etnik kampung naga.

Untuk itu untuk menjawab fokus penelitian di atas, disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam menyikapi budaya etnik kampung naga?
2. Upaya apa yang dilakukan sekolah agar masyarakat budaya etnik kampung naga berpartisipasi dalam meningkatkan layanan pendidikan anak di sekolah?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat pelayanan pendidikan anak budaya etnik kampung naga?
4. Apakah sekolah sudah melaksanakan pelayanan inklusif bagi anak budaya etnik kampung naga?
5. Bagaimana model pengelolaan pendidikan bagi anak budaya etnik minoritas kampung naga?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bermaksud menelusuri konsep pelayanan pendidikan seperti apa yang dilakukan di sekolah yang memiliki siswa dari budaya etnik kampung naga. Adapun secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah dapat:

- a. Menemukan gambaran nyata tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang memiliki siswa budaya etnik kampung naga
- b. Menemukan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh sekolah dan peran masyarakat budaya etnik kampung naga dalam pendidikan anak budaya etnik kampung naga
- c. Menemukan faktor penunjang dan penghambat pelayanan pendidikan dalam aturan adat dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari implementasi pendidikan inklusif
- d. Menemukan pelayanan inklusif yang sudah ada bagi siswa budaya etnik kampung naga.
- e. Menemukan model pengelolaan pendidikan anak etnik minoritas secara hipotetik dari kasus yang terjadi di sekolah yang memiliki siswa budaya etnik kampung naga

2. *Manfaat Penelitian*

Paradigma pendidikan inklusif dewasa ini senantiasa mempengaruhi pendidikan kebutuhan khusus. Salah satunya adalah merujuk pada bagian tugas pemerintah melalui Wajar Dikdas 9 tahun, yang mencanangkan pendidikan dasar bagi semua anak.

Dalam tatanan teori dan praktek pendidikan kebutuhan khusus banyak dipengaruhi oleh sistem yang dibentuk oleh undang-undang. Kaitannya dengan pasal 32 UU Sisdiknas tahun 2003 tentang pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus secara tegas tersirat bahwa pendidikan di daerah etnik minoritas merupakan bagian dari layanan pendidikan khusus.

Untuk itu manfaat terpenting dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, sebagai masukan keilmuan tentang pendidikan inklusif untuk daerah etnik minoritas, yang saat ini kurang diperhatikan. Serta untuk menjawab keterkaitan pasal 32 UUSPN 2003 tentang layanan pendidikan khusus yang masuk ke dalam bidang pendidikan kebutuhan khusus.
- b. Bagi sekolah, memberikan masukan bahwa pelayanan terhadap siswa harus bersifat inklusif sesuai dengan kaidah-kaidah sekolah yang terbuka menerima semua anak, termasuk dari etnik minoritas.
- c. Bagi Dinas Pendidikan, pembinaan dan pengembangan model pendidikan berorientasi pada budaya etnik setempat.



D. Definisi Konsep

1. Strategi Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Strategi merupakan cara tepat dalam menghadapi permasalahan dan menyelesaikannya dengan tepat serta cermat. Strategi pelayanan pendidikan di sekolah kepada siswa etnik minoritas kurang banyak disinggung oleh kalangan pemerhati pendidikan, dari unsur departemen pendidikan nasional maupun penyelenggara pendidikan.

Strategi pendidikan dimulai dari perencanaan pembelajaran yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Ibrahim dkk., (2002: 49-50) menjelaskan tentang mekanisme pembelajaran yang harus dilakukan dibagi menjadi empat tahap. Keempat tahap yang dimaksud yaitu; tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut.

Pengelolaan sekolah sebagai bagian integral dari manajemen pendidikan pada pemerintahan kabupaten kota adalah memfasilitasi kebutuhan sekolah yang meliputi pengawasan, pengendalian, mengembangkan standar kompetensi siswa dan petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa (Syaiful Sagala, 2003:153).

2. Budaya Etnik Kampung Naga

Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya.

Hal ini mempengaruhi pada perlakuan mereka memaknai pendidikan bagi anak-anaknya yang menekankan pada perilaku tradisi yang dijalankan oleh mereka baik di rumah maupun di tempat pendidikan. Salah satunya adalah yang terjadi di SDN Neglasari, yang merupakan lokasi penelitian yang bersinggungan langsung dengan budaya etnik kampung naga.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan.

Sementara dalam keterlibatannya, sekolah dan masyarakat merupakan *partnership* dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, di antaranya :

- a. Sekolah dengan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
- b. Sekolah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaruan tetapi juga

dalam menerima berbagai kosekuensi dan dampaknya, serta mencari alternatif pemecahannya.

- c. Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik.

4. Landasan Hukum Pendidikan Inklusif Etnik Minoritas

Dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (**Co-ordinator@iddc.org.uk**), Kutipan dari Pasal 2, 23, 28 dan 29. yang berbunyi:

Pasal 2

1. Negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukumnya tanpa diskriminasi apapun, tanpa memandang ras anak atau orang tua atau walinya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, suku atau asal muasal sosial, hak milik, kecacatan, kelahiran ataupun status

Pasal 23

1. Negara mengakui bahwa anak yang menyandang kecacatan mental ataupun fisik seyogyanya menikmati kehidupan yang layak dan utuh, dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kemandirian serta memberi kemudahan kepada anak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pasal 28

1. Negara mengakui hak anak atas pendidikan dan mengupayakan pencapaian hak secara berangsur-angsur dan atas dasar kesamaan kesempatan, negara seyogyanya:
 - a) membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma bagi semua anak
 - b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan yang dapat diakses setiap anak

Pasal 29

.....c) pengembangan penghargaan terhadap orang tua anak, identitas budayanya, bahasa dan nilai-nilai yang dianutnya, terhadap nilai-nilai nasional dari tempat tinggal anak, negara tempat asalnya dan terhadap peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri

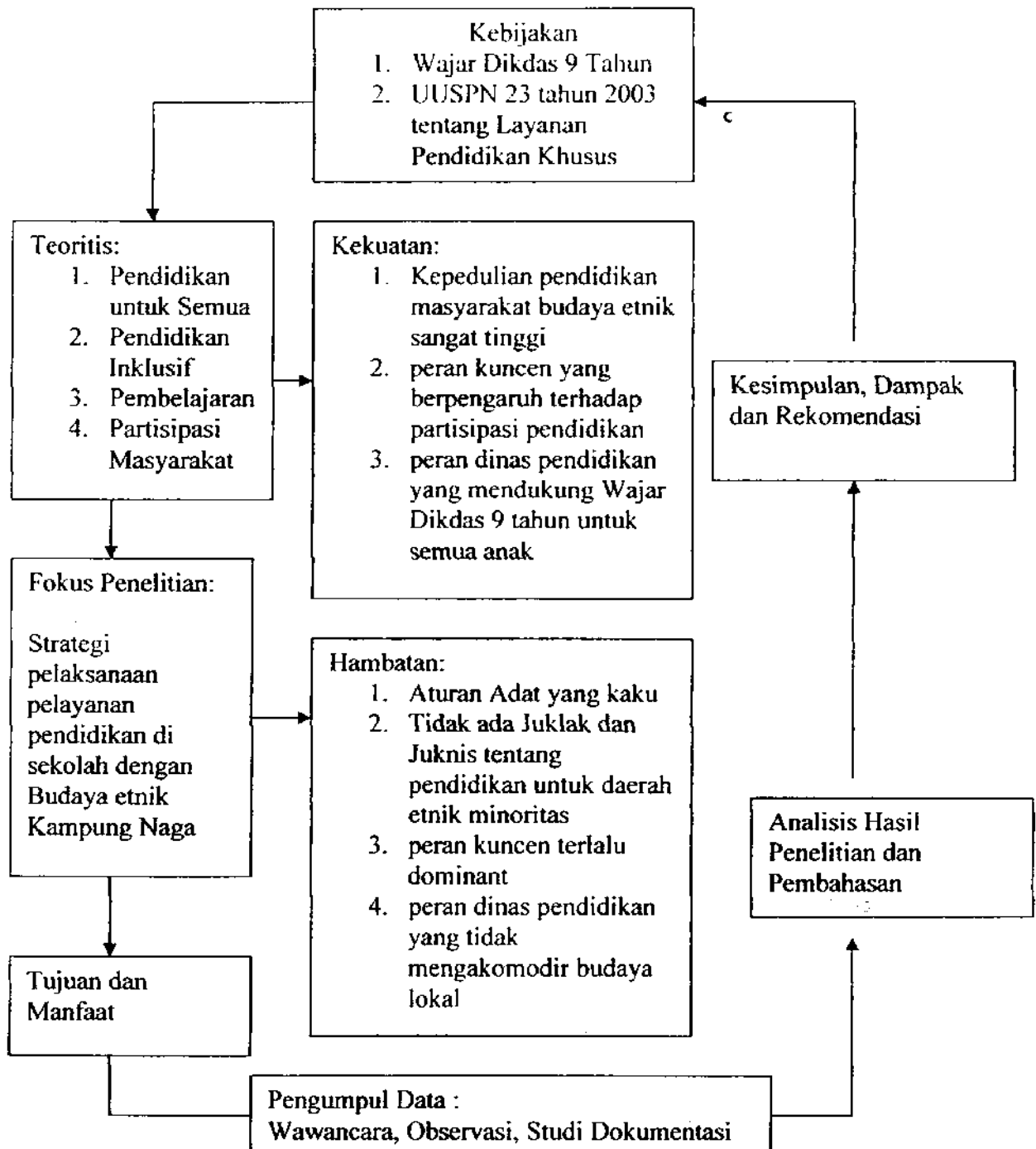
E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengungkap dan menjelaskan berbagai gambaran atas fenomena-fenomena yang ada di lapangan kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk saling melengkapi sehingga dapat diperoleh dan diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan observasi, sedangkan data

sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Adapun alur penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.
Skema Alur Penelitian



F. Asumsi Penelitian

1. Keberhasilan suatu pendidikan pada dasarnya sangat ditentukan oleh mutu pembelajaran yang dilakukan di kelas.
2. Masyarakat budaya etnik kampung naga merupakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya etniknya, sehingga layanan pendidikan harus disesuaikan dengan budaya etnik mereka.
3. Pendidikan Inklusif sebagai bagian paradigma pendidikan untuk semua termasuk didalamnya anak dari budaya etnik kampung naga
4. Diperlukan strategi pelayanan pendidikan yang baik, mampu mengakomodir dua kepentingan yaitu kepentingan pendidikan secara nasional dan kepentingan secara budaya
5. Kesadaran pihak penyelenggara pendidikan yang dimulai dari kepala sekolah sebagai perencana, evaluasi dan monitoring, mampu membuat program yang sesuai dengan adat kebudayaan di kampung naga.
6. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah akan banyak membantu pelaksana pendidikan dalam hal ini guru, untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan aspek tujuan pendidikan dan tujuan budaya etnik kampung naga.
7. Guru sebagai pelaksana program pendidikan dituntut untuk dapat membuat manajemen pembelajaran pada siswa.
8. Aspek lain yang sangat penting adalah pendekatan sekolah dalam rangka menarik partisipasi dari masyarakat budaya etnik kampung naga. Hal ini

penting mengingat semua pendapat yang dikeluarkan oleh sekolah belum tentu akan direspon positif oleh masyarakat, apabila pihak kepala adat atau kuncen tidak membantu dalam sosialisasinya. Sehingga keberadaan kuncen di budaya etnik kampung naga dapat dijadikan mitra atau bagian dari pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah.*

9. Untuk dapat merumuskan berbagai masalah yang dihadapi sekolah perlu juga dikaji tentang faktor penunjang dan penghambat pelayanan pendidikan di sekolah dalam budaya etnik kampung naga secara mendalam.
10. Kasus yang terjadi di sekolah dalam budaya etnik kampung naga bisa menjadi model pendidikan bagi etnik minoritas lainnya di Indonesia.

G. Lokasi dan Informan Penelitian

Lokasi di SDN Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi penyelenggara pendidikan di sekolah dalam latar belakang budaya etnik kampung naga dengan informan penelitian yaitu:

1. Kepala Sekolah berjumlah 1 orang
2. Pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu berjumlah 2 orang
3. Guru SDN Neglasari berjumlah 6 orang
4. Kuncen budaya etnik kampung naga berjumlah 1 orang
5. Orang Tua dari budaya etnik kampung naga berjumlah 2 orang dan di luar kampung naga 1 orang